JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Manado Bagi Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam Di Kota Manado

Charsten Hermano Bawulele[1]
Stefanus Sampe[2]
Franky R D Rengkung[3]

Email Korespondensi: charstenbawulele@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Manado Bagi Masyarakat Yang Terdampak Bencana Alam Di Kota Manado. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik berupa hancurnya infrastruktur, rumah tinggal, fasilitas umum, dan jaringan transportasi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, psikologis, bahkan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu pentingnya penerapan kebijakan terkait penangangan dampak banjir di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada informasi yang berkaitan dengan efektifitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indicator teori Budiani (2007:53) dalam buku Siahaan dkk., (2022:102). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Alam di Kota Manado berjalan efektif pada beberapa kali bencana alam yang terjadi di kota manado. kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan logistik, pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan dasar, serta koordinasi dalam penanganan darurat telah membantu mengurangi beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pada tahap awal pasca bencana oleh sebab itu diharapkan pemerintah tidak hanya perlu memfokuskan perhatian pada penanganan tanggap darurat, tetapi juga memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya pemulihan kondisi masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan rumah yang rusak, pemulihan sarana dan prasarana umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, serta penyediaan program bantuan yang berkelanjutan

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Bencana Alam

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Kota Manado merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama banjir, tanah longsor, gelombang pasang, cuaca ekstrem, serta banjir rob pada wilayah pesisir. Kondisi topografi Kota Manado yang terdiri atas daerah dataran rendah, kawasan pesisir, serta wilayah perbukitan menyebabkan ancaman bencana terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada musim penghujan. Selain faktor alam, pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air, pembangunan permukiman di bantaran sungai, serta sistem drainase yang belum optimal semakin meningkatkan potensi terjadinya bencana di berbagai wilayah Kota Manado.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Manado berulang kali mengalami banjir besar yang mengakibatkan ribuan masyarakat terdampak. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Manado bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui penyaluran bantuan logistik, pembangunan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur, pemberian bantuan sosial, pelayanan kesehatan, penyediaan dapur umum, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat terdampak bencana.

Dari tahun 2023-2026 tercatat 3 bencana alam yang menyita perhatian pemerintah dan masyarakat yakni:

1. Banjir dan Longsor Ekstrem (27 Januari 2023)

- Jenis Bencana: Banjir setinggi 80–300 cm dan tanah longsor akibat luapan Sungai Tondano.
- Dampak: Melanda 9 kecamatan dan puluhan kelurahan, menyebabkan 5 orang meninggal dunia (4 tertimbun longsor, 1 terseret arus), serta memaksa ribuan warga mengungsi. Ratusan rumah mengalami rusak berat hingga ringan.

2. Banjir Pemukiman (Akhir Mei 2026)

- Jenis Bencana: Banjir akibat hujan lebat yang merendam kawasan permukiman.
- Dampak: Sebanyak 468 rumah terendam dan 747 jiwa dari 314 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

3. Gempa Bumi Tektonik M 7,6 (April 2026)

- Jenis Bencana: Gempa bumi kuat yang mengguncang Kota Manado dan sekitarnya.
- Dampak: Merobohkan sebagian struktur luar Gedung GOR KONI Manado di Sario dan menyebabkan 1 orang warga meninggal dunia tertimpa reruntuhan material bangunan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Manado telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan, baik yang bersifat tanggap darurat, pemulihan, maupun pencegahan. Beberapa program seperti bantuan sosial, relokasi warga terdampak, pembangunan infrastruktur seperti irigasi air dan sarana

pengendali banjir lainnya, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi korban bencana yang merupakan langkah pemerintah untuk pemulihan pasca bencana. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka pascabencan

Namun demikian, berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan seperti keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan data masyarakat terdampak, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, terbatasnya anggaran penanggulangan bencana, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses mitigasi dan pemulihan pascabencana. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah sehingga tujuan utama perlindungan masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Selain itu, masyarakat terdampak sering kali memiliki persepsi yang berbeda terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Sebagian masyarakat merasa bahwa bantuan yang diberikan telah membantu memenuhi kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa proses distribusi bantuan masih belum merata, kurang transparan, serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan laporan administratif pemerintah, tetapi juga harus dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Dalam praktiknya, pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan berbagai lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, aparat keamanan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, serta relawan. Banyaknya aktor yang terlibat menuntut koordinasi yang efektif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan pengambilan keputusan pada saat keadaan darurat.

Di sisi lain, paradigma penanggulangan bencana saat ini telah mengalami perubahan dari pendekatan yang bersifat responsif menuju pendekatan yang lebih preventif melalui pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya fokus pada penanganan korban setelah bencana terjadi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, sistem peringatan dini, penataan ruang yang berbasis mitigasi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari keberhasilan menangani dampak bencana, tetapi juga dari kemampuan mencegah dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang akurat melalui observasi terhadap permasalahm atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk Penelitian ini berlokasi di kota Manado, provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini berfokus pada informasi yang berkaitan dengan efektifitas kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indicator teori Budiani (2007:53) dalam buku Siahaan dkk., (2022:102) efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu mengukur sejauh mana tingkat para peserta dalam pelaksanaan program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
4. Pemantauan program, yaitu suatu hentuk kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan indikator pertama dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan menurut Budiani (2007). Indikator ini menekankan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, ketepatan sasaran diukur dari sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar mengalami kerugian akibat bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Manado diketahui bahwa proses penyaluran bantuan diawali dengan pelaksanaan asesmen cepat (rapid assessment) dan pendataan korban oleh tim BPBD

bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kepala lingkungan. Pendataan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah korban, tingkat kerusakan rumah, lokasi terdampak, dan kebutuhan mendesak masyarakat. Data hasil pendataan kemudian diverifikasi sebagai dasar penetapan penerima bantuan sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Manado yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial menggunakan data hasil verifikasi dari BPBD dan pemerintah kelurahan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi makanan siap saji, paket sembako, selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya sesuai kondisi masyarakat terdampak. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai korban bencana.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Lurah Dendengan Dalam menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam proses pendataan awal masyarakat terdampak. Aparat kelurahan bersama kepala lingkungan melakukan identifikasi terhadap rumah yang mengalami kerusakan, jumlah anggota keluarga yang terdampak, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut kemudian disampaikan kepada BPBD dan Dinas Sosial sebagai dasar distribusi bantuan. Menurut informan, secara umum bantuan telah diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak meskipun pada tahap awal masih ditemukan beberapa warga yang belum langsung terdata akibat kondisi banjir yang masih tinggi dan akses menuju lokasi yang terbatas.

Pandangan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan pemerintah telah diterima oleh warga yang rumahnya terdampak banjir dan mengalami kerusakan. Bantuan berupa makanan, air bersih, sembako, selimut, serta kebutuhan pokok lainnya dinilai sangat membantu masyarakat pada masa tanggap darurat. Namun demikian, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa terdapat keterlambatan penyaluran bantuan kepada sebagian warga karena proses pendataan masih berlangsung dan kondisi lapangan belum sepenuhnya memungkinkan untuk dilakukan distribusi secara merata.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran kebijakan pemerintah dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam di Kota Manado telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme pendataan, verifikasi, dan koordinasi antarinstansi sebelum bantuan disalurkan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa perubahan data korban, keterbatasan akses menuju lokasi terdampak, serta dinamika jumlah masyarakat yang mengungsi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menerima bantuan beberapa waktu setelah bencana terjadi.

Berdasarkan teori Budiani (2007), efektivitas program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari ketepatan penerima manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hasil penelitian

menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran telah terpenuhi, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam sistem pendataan berbasis digital, pembaruan data masyarakat secara berkala, serta peningkatan koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat pada setiap kejadian bencana.

2. Sosialisasi Program

Indikator kedua dalam teori efektivitas Budiani (2007) adalah sosialisasi program. Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, prosedur, dan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Manado, sosialisasi mengenai kebijakan penanggulangan bencana dilakukan melalui berbagai media, antara lain pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, media sosial resmi, grup komunikasi masyarakat, penyuluhan kebencanaan, simulasi evakuasi, serta pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana. Selain memberikan informasi mengenai bantuan yang tersedia, BPBD juga secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana, jalur evakuasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam.

Kepala Dinas Sosial Kota Manado menjelaskan bahwa penyampaian informasi mengenai bantuan sosial dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, posko bencana, serta petugas di lapangan. Masyarakat diberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan, persyaratan administrasi, serta jenis bantuan yang dapat diterima sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Menurut informan, sosialisasi menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya selama proses penanganan bencana.

Hal yang sama disampaikan oleh Lurah Dendengan Dalam yang menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan warga, kepala lingkungan, pengumuman di kantor kelurahan, media sosial, dan grup WhatsApp lingkungan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada saat terjadi bencana, aparat kelurahan juga memberikan informasi secara langsung di lokasi pengungsian sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal distribusi bantuan, lokasi pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan pemerintah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar informan mengaku memperoleh informasi mengenai bantuan dari kepala lingkungan, aparat kelurahan, dan grup komunikasi warga. Mereka juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan cukup jelas sehingga masyarakat mengetahui prosedur penerimaan bantuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai perbedaan jenis bantuan, persyaratan administrasi, maupun mekanisme bantuan lanjutan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi program telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui berbagai media komunikasi dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan di tingkat daerah hingga kelurahan. Keterlibatan kepala lingkungan sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi faktor pendukung keberhasilan sosialisasi karena kepala lingkungan lebih memahami kondisi sosial masyarakat di wilayahnya.

Menurut Budiani (2007), keberhasilan sosialisasi program akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Semakin baik penyampaian informasi kepada masyarakat, maka semakin besar peluang tercapainya tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, indikator sosialisasi program dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai mitigasi bencana, prosedur penyaluran bantuan, pemanfaatan media digital, serta penguatan komunikasi publik agar seluruh masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam di Kota Manado dapat semakin ditingkatkan.

3. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program merupakan indikator ketiga dalam teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007). Indikator ini menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau program dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan program diukur dari kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, serta mempercepat proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Manado, tujuan utama kebijakan penanggulangan bencana adalah menyelamatkan masyarakat, mengurangi risiko korban jiwa, memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut informan, selama pelaksanaan penanganan bencana pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat melalui pendirian posko tanggap darurat, evakuasi masyarakat, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mewujudkan tujuan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Manado yang menjelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Bantuan berupa makanan siap saji, paket sembako, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya mampu mengurangi beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun mata pencaharian akibat bencana. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil,

dan penyandang disabilitas agar tetap memperoleh pelayanan sosial secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Dendengan Dalam diketahui bahwa kehadiran pemerintah pada saat terjadi bencana memberikan dampak positif terhadap kondisi masyarakat. Bantuan yang disalurkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama masa darurat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah kelurahan, BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan relawan berjalan cukup baik sehingga proses penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara lebih terarah.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi korban bencana. Ketiga informan menyampaikan bahwa bantuan berupa makanan, air bersih, sembako, serta kebutuhan pokok lainnya sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama mereka belum dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi. Masyarakat juga menilai bahwa kehadiran pemerintah pada masa tanggap darurat memberikan rasa aman karena kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan mengemukakan bahwa proses pemulihan ekonomi masyarakat memerlukan waktu yang relatif lama. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan sementara akibat banjir masih membutuhkan dukungan lanjutan berupa bantuan pemulihan ekonomi maupun perbaikan rumah yang mengalami kerusakan. Selain itu, permasalahan banjir yang berulang menunjukkan bahwa upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan agar tujuan jangka panjang kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Budiani (2007), suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, tujuan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana telah tercapai dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari tersedianya bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, pencapaian tujuan dalam aspek rehabilitasi, rekonstruksi, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan pada masa tanggap darurat, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, indikator pencapaian tujuan program dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup efektif, karena sebagian besar tujuan kebijakan telah tercapai. Akan tetapi, pemerintah masih perlu memperkuat program rehabilitasi, pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan indikator terakhir dalam teori efektivitas Budiani (2007). Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, serta menjadi

dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatan pemantauan memiliki peran penting karena berkaitan dengan ketepatan distribusi bantuan, kondisi masyarakat pascabencana, serta keberlanjutan proses rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kota Manado, pemantauan dilakukan secara langsung melalui monitoring lapangan oleh petugas BPBD bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selain melakukan pengecekan terhadap kondisi masyarakat terdampak, BPBD juga menerima laporan perkembangan dari posko bencana serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah masa tanggap darurat berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam memperbaiki mekanisme penanganan bencana pada kejadian berikutnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Manado juga menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui pengawasan terhadap distribusi bantuan, pemeriksaan daftar penerima manfaat, serta koordinasi dengan aparat kelurahan. Setiap laporan masyarakat mengenai keterlambatan atau belum diterimanya bantuan akan diverifikasi kembali sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah tindak lanjut. Mekanisme tersebut bertujuan agar seluruh bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan hasil pendataan.

Sementara itu, Lurah Dendengan Dalam menyampaikan bahwa pemerintah kelurahan turut melakukan pemantauan dengan mendampingi proses distribusi bantuan, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan pendataan ulang terhadap kondisi rumah dan kebutuhan warga setelah banjir surut. Pemerintah kelurahan juga menyampaikan hasil pemantauan kepada BPBD dan Dinas Sosial sebagai bahan evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa aparat pemerintah masih melakukan kunjungan ke lingkungan warga setelah bantuan diberikan. Petugas menanyakan kondisi masyarakat, mendata kembali kerusakan rumah, serta memastikan apakah masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi. Masyarakat juga menyatakan bahwa mereka dapat menyampaikan keluhan kepada kepala lingkungan maupun kantor kelurahan apabila terdapat permasalahan terkait bantuan pemerintah.

Walaupun mekanisme pemantauan telah berjalan, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang masih memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang harus memantau seluruh wilayah terdampak secara bersamaan ketika bencana berskala besar terjadi. Selain itu, perubahan kondisi di lapangan yang berlangsung sangat cepat menyebabkan proses pembaruan data membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, terdapat beberapa masyarakat yang baru memperoleh tindak lanjut setelah proses verifikasi selesai dilakukan.

Menurut Budiani (2007), pemantauan merupakan bagian penting dalam mengukur efektivitas program karena melalui proses tersebut pemerintah dapat mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemantauan yang dilakukan Pemerintah Kota Manado telah menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Namun demikian, efektivitas pemantauan masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pendataan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan mekanisme koordinasi antarinstansi..

Kesimpulan

Ketepatan sasaran program menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam telah berjalan cukup efektif

Sosialisasi program telah dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi, antara lain pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, posko bencana, media sosial, grup komunikasi masyarakat, serta kegiatan penyuluhan dan simulasi kebencanaan

Pencapaian tujuan program menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan logistik, pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan dasar, serta koordinasi dalam penanganan darurat telah membantu mengurangi beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pada tahap awal pascabencana.

4. Pemantauan program telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring lapangan, evaluasi pelaksanaan bantuan, pendataan ulang masyarakat terdampak, serta penanganan pengaduan masyarakat oleh BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah kelurahan

Saran

Pemerintah Kota Manado, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, perlu meningkatkan akurasi dan kecepatan pendataan masyarakat terdampak melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan.

pemerintah perlu meningkatkan intensitas penyebarluasan informasi mengenai kebijakan penanggulangan bencana, mekanisme penyaluran bantuan, serta hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital.

pemerintah tidak hanya perlu memfokuskan perhatian pada penanganan tanggap darurat, tetapi juga memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah kelurahan perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana

Daftar Pustaka

Amantha, G. K., & Rahmaini, P. (2020). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020. Jurnal Dinamika, 1(1), 1-5.

Apsari, N. (2025). Transformasi Kebijakan Publik Pasca Bencana: Studi Kasus Kecamatan Katanga Kota Palu. Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 2(1), 152-163.

Aula, N. A. F. (2025). Aspek Hukum dalam Pemulihan Pasca Bencana: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah. LSHP RESEARCH:

Law Sciences, Humanities and Politics Journal, 1(1), 7-14.

Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. Jurnal eksekutif, 1(1).

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83-88.

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muryanto, F., & Djaja, D. K. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Publik dalam Manajemen Risiko Bencana Alam di Indonesia. Economics and Digital Business Review, 6(2), 1276-1281.

Nopindo, J. (2026). Politik Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengendalian Bencana Banjir Berbasis Perlindungan Lingkungan Hidup. Journal Wasaka Critical Law Review, 14(1), 120-132.

Sadat, A. (2016). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 1(1), 1-20.

Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 2(1), 66-81.

Sagay, S. D. C., & Pangemanan, F. N. (2023). Efektivitas Sistem Peringatan Dini Untuk Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Manado. Governance, 3(1).

Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 4(7), 1323-1332.

Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2021). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service